



Korespondensi
Email1 : renia.mala26@gmail.com
Email2 : bustami.rahman@gmail.com
Email3 : sarpinfarras@gmail.com



Inovbook Publications
Wisma Monex 9th Floor
Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) SEBAGAI INOVASI DI DESA JELUTUNG II KECAMATAN SIMPANG RIMBA TAHUN 2020

Renia^{1*}, Bustami Rahman^{2*}, Sarpin^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 April 2022

Abstract

Politics Implementation of Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Program (BSPS) in Jelutung II Village, Simpang Rimba Subdistrict in 2020 (Supervised by Bustami Rahman and Sarpin). Implementation is an activity, action, and exercise. However, implementation is not just an ordinary activity, but implementing planned activities to achieve a set goal. The purpose of this research is to find out the politics implementation of Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Program and to analyze the supporting and hindering factors for implementing the BSPS program in Jelutung II Village. This study used the theory of policy implementation from Merilee S. Grindle as the basis for the research. Related to concept of policy implementation, there were two major variables. First, the content of the policy had six other indicators, namely; a) The interests of the objective group (target group). b) The types and benefits received by the target group. c) The degree of change desired. d) The location of a program. e) Program implementation or implementers. f) Resources. Second, based on the policy environment, there were three other indicators, namely: a) The power, interests, and strategies of the actors involved. b) Characteristics of institutions and authorities c) Compliance and responsiveness. The results of this study indicated that implementing Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) program in Jelutung II Village, Simpang Rimba District had been implemented even though it was running less effectively. Based on several policy implementation factors, according to Grindle, there were some less effective in implementing the BSPS program policies in Jelutung II Village. It could be seen from the time of determining the prospective beneficiaries of assistance, there were still inappropriate recipients, delays in construction goods and limitations of the existing budget from the beneficiaries. The supporting factor of the BSPS program in Jelutung II Village was the good quality of building materials. The inhibiting factors were the weather, the availability of builders and delays in building materials.

Keywords: Policy, Implementation, BSPS, Jelutung II Village

Abstrak

Implementasi merupakan suatu aktivitas, aksi dan tindakan. Namun, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas biasa, melainkan pelaksanaan kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui politik implementasi program bantuan stimulan

perumahan swadaya (BSPS) dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat implementasi program BSPS di Desa Jelutung II. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai landasan dasar penelitian. Terkait konsep implementasi kebijakan tersebut terdapat dua variabel besar yakni, yang pertama isi kebijakan yang terdapat enam indikator lainnya yaitu; a) kepentingan kelompok sasaran (target group). b) jenis dan manfaat yang diterima oleh target group. c) derajat perubahan yang diinginkan. d) letak sebuah program. e) pelaksanaan program atau implementor. f) sumber daya. Kemudian yang kedua berdasarkan lingkungan kebijakan terdapat tiga indikator lainnya yaitu: a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b) karakteristik lembaga dan penguasa c) kepatuhan dan daya tanggap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba sudah terimplementasi walaupun berjalan kurang efektif. Berdasarkan dari beberapa faktor-faktor implementasi kebijakan menurut Grindle terdapat beberapa yang kurang efektif dalam pelaksanaan kebijakan program BSPS di Desa Jelutung II. Hal tersebut terlihat dari pada saat penentuan calon penerima bantuan masih terdapat penerima yang kurang tepat serta adanya keterlambatan barang bangunan dan keterbatasan dari anggaran yang ada dari penerima bantuan. Faktor pendukung dari program BSPS di Desa Jelutung II yaitu, kualitas bahan bangunan yang bagus. Adapun faktor penghambatnya ialah cuaca, ketersediaan tukang bangunan dan keterlambatan bahan bangunan.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, BSPS, Desa Jelutung II

I. PENDAHULUAN

Kebijakan publik menurut Suciati Annisa (2017) adalah beberapa aktivitas pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat di dalam masyarakat. Tidak hanya berhenti pada proses pembuatan kebijakan, namun juga terdapat proses implementasi dari kebijakan yang menjadi variabel penting yang berpengaruh pada

keberhasilan dari kebijakan tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI). Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Selain itu, adapun tujuan utama dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, sehat dan bersih. Hal tersebut tertera dalam peraturan Kementerian PUPR No 07 Tahun 2018 tentang BSPS Bab I Pasal 1 ayat (1) berbunyi: BSPS adalah bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah serta pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Kriteria-kriteria penerimaan dari program BSPS yaitu, Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah dengan kondisi yang tidak layak huni, tidak pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan, berpenghasilan paling banyak upah minimum provinsi, bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng. Jadi hal diatas lah yang menjadi pertimbangan bagi penerima program BSPS. Kriteria- kriteria diatas terdapat dalam peraturan PUPR No 07 Tahun 2018 tentang BSPS Bab IV pasal 11 Ayat (1).

Akhir tahun 2019, di Kecamatan Simpang Rimba terdapat beberapa Desa yang mengajukan program BSPS salah satunya yaitu Desa Jelutung II. Dalam proses pengajuan program BSPS terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Desa yang bersangkutan yaitu, membuat proposal dan memberi nama-nama calon penerima bantuan yang kemudian dikirim ke PUPR Kabupaten Bangka Selatan.

Alasan pemerintahan Desa Jelutung II mengajukan program BSPS yaitu, membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas

hunian yang layak. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menyebutkan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Oleh karena itu, dengan adanya program BSPS pemerintah berharap dapat membantu masyarakat sesuai dengan Undang-Undang diatas dengan memberikan kehidupan yang layak, aman, tenang dan bahagia bagi setiap orang yang benar-benar membutuhkan.

Namun, dalam pelaksanaan dari program BSPS terdapat beberapa kendala salah satunya, komunikasi antara perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS dengan masyarakat, mengenai adanya program BSPS serta rincian dari program BSPS tersebut. Sehingga menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat yang mendapatkan bantuan dari program BSPS. Masyarakat merasa khawatir mengenai kekurangan biaya dalam pembangunan rumah. Dimana mereka tidak mempunyai biaya lebih untuk menutupi semua jenis kekurangan dalam proses pembangunan tersebut. Karena hal tersebut akan membawa mereka kepada permasalahan yang baru bagi mereka.

Selain itu, diharapkan dalam proses pembangunan rumah tenaga fasilitator lapangan (TFL) harus berada di lapangan sehingga dapat memberikan arahan kepada masyarakat sebagaimana mestinya yang sesuai dengan konsep pelaksanaan program BSPS. Namun, kenyataannya dilapangan TFL tidak bertugas sebagaimana mestinya, yang seharusnya TFL mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan rumah, namun hal tersebut tidak dilakukan dengan baik dan lagi pada proses penentuan pemilihan calon penerima bantuan BSPS lebih mengutamakan kerabat dekat, keluarga, teman dan keluarga.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan Kualitatif deskriptif. Menurut Idrus (2009) penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang meneliti informan sebagai objek penelitian secara mendalam, serta menganalisis segala aktivitas dari objek penelitian tersebut. Dengan demikian, pengertian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang

melakukan penelitian dengan melihat objek penelitian secara mendalam. Penelitian ini dapat berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara wajar. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap relevan dalam mengkaji "Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020".

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dalam penelitian ini terhitung dari bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba agar lebih memudahkan peneliti untuk turun lapangan.

Target/Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jelutung II, perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba.

Prosedur

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020. Dalam penentuan informan tersebut peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang termasuk kedalam kriteria dari judul penelitian peneliti.

Pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mengambil sebuah data dengan cara mengamati dan memperhatikan secara langsung pada Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak

mengikuti pedoman wawancara yang sudah ada sebelumnya, sehingga peneliti lebih bebas menentukan pertanyaan tetapi tidak lepas dari hal utama dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jelutung II, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSP di Desa Jelutung II dan Perangkat Desa Jelutung II yang bertanggung jawab dalam program BSPS.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data berupa buku-buku, berita dan artikel dari internet, beserta dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk sumber data atau informasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti, seperti wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder menurut Rahman dan Ibrahim (2009) merupakan sumber data penunjang atau sumber data tambahan, seperti buku serta dokumen peraturan yang sesuai dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang menerima Program Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2019. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai inovasi dari pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada, seperti rumah tidak layak huni, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Politik implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Jelutung II tahun 2020

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Marilee S. Grindle dalam Subarsono tahun (2021) yang terdapat dua variabel besar, yaitu 1) isi kebijakan, 2) lingkungan kebijakan.

1. Isi kebijakan mencakup beberapa indikator sebagai berikut;

a. Kepentingan kelompok sasaran

Pada dasarnya sebuah kebijakan yang dirancang harus memiliki tujuan dan target yang jelas. Dalam program BSPS sudah dijelaskan bahwa target dari program BSPS, yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: BSPS ialah bantuan dari pemerintah untuk MBR yang mempunyai keterbatasan daya beli. Dengan adanya keterbatasan tersebut masyarakat sulit untuk membangun rumah yang layak huni sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan yang pemerintah berikan dalam program BSPS bukan berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang dibeli dari toko bangunan terdekat oleh perangkat Desa dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan didampingi oleh penanggung jawab program BSPS di Kabupaten. Adapun jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp 17.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut, Rp 15.000.000,00 untuk bahan bangunan dan Rp 2.500.000,00 untuk upah pembangunan rumah.

Dengan demikian kebijakan dari program BSPS mengenai sasaran atau *target group* yang dituju sudah sangat jelas. Dalam kebijakan sudah disebut target dari program BSPS ini merupakan Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR). Melihat dari isi kebijakan mengenai target dari kebijakan tersebut sudah sangat baik, hanya tinggal implementasi dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan program BSPS sudah sangat matang dan terencana. Dimana dalam kebijakan tersebut sudah disebutkan dengan baik target utama program BSPS.

b. Jenis dan manfaat yang diterima oleh *target group*

Program BSPS merupakan program yang dirancang sesuai dengan persoalan

yang dihadapi oleh masyarakat. Dari persoalan-persoalan tersebut dapat menghasilkan suatu solusi dari pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan maupun program. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah tidaklah sedikit, salah satunya, yaitu kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Oleh karena itu, dengan adanya program BSPS diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Denga demikian program BSPS diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya program ini dapat memberikan suatu perubahan yang baik bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat membangun sebuah rumah layak huni dengan bantuan pemerintah, sehingga mereka dapat menempati rumah yang aman dan bersih. Sebab dari itu, program BSPS dikhususkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang pada awalnya menempati rumah yang tidak layak huni dapat membantu mereka menempati rumah yang layak huni yang lebih bersih, nyaman dan memberikan perasaan yang aman bagi penghuninya.

c. Derajat perubahan yang diinginkan.

Program BSPS merupakan Program yang dirancang berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dikalangan masyarakat. Dengan begitu perubahan yang diinginkan harus berpihak kepada masyarakat. Dari implementasi program BSPS diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar bagi suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga program tersebut dapat dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Adapun perubahan yang diinginkan atau diharapkan dalam program BSPS, yaitu setiap masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat menempati Rumah yang layak huni. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan dapat menekankan angka kemiskinan serta

dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

d. Letak sebuah program

Program BSPS merupakan program yang dirancang khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Sedangkan rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan keamanan. Sementara itu, pada proses implementasi dari program BSPS terdapat suatu hal yang mengganjal di masyarakat. Dimana sasaran atau target utama yang seharusnya masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dirasa kurang tepat sasaran. Sedangkan hal tersebut sudah tertulis dalam peraturan menteri PUPR tahun 2018 bahwa BSPS merupakan program untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

MBR ialah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan pendapatan dibawah tiga juta perbulan. Oleh karena itu, dengan kata lain masyarakat ini tergolong ke dalam masyarakat yang kurang mampu, sehingga membutuhkan bantuan pemerintah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya salah satunya rumah layak huni.

Sedangkan penerima bantuan program BSPS rata-rata pendapatan yang mereka raih perbulan lebih dari empat juta bahkan ada yang mencapai angka enam juta perbulan. Angka pendapat tersebut merupakan angka yang tidak masuk kedalam kategori penerima bantuan dari program BSPS dan sudah lebih dari upah minimum provinsi, karena dalam program BSPS yang dapat menerima bantuan tersebut ialah mereka yang memiliki penghasilan paling tinggi Upah Minimum daerah atau Provinsi. Sedangkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp 3.264.884,00 (tribunnews.com). Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sasaran dari program BSPS di Desa Jelutung II kurang tepat. Seharusnya

sebelum menentukan penerima bantuan perangkat Desa dan TFL harus mengecek penghasilan dari masyarakat terlebih dahulu. Kemudian mulailah melakukan pengamatan atau pertimbangan dengan melibatkan partisipasi dari semua kalangan dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya itu dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II kurangnya pengawasan dari pihak Kabupaten dan TFL. Dimana seharusnya TFL dan pihak Kabupaten harus memastikan terlebih dahulu apakah penerima sudah pantas atau belum. Sehingga hal diatas merupakan salah satu penyebab dari kurang tepatnya sasaran program BSPS di Desa Jelutung II.

e. Pelaksana program atau implementor

Pelaksana atau implementor dalam suatu program merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kebijakan. Dimana pelaksana program ialah penggerak sebagai alat untuk mencapai tujuan dari termuatnya suatu kebijakan. Agen pelaksana atau implementor dari suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam indikator ini peneliti akan melihat kinerja agen pelaksana dalam suatu kebijakan, yaitu kebijakan mengenai program BSPS.

Program BSPS terdapat beberapa pelaksana yang berperan penting dalam proses implementasi di tingkat Desa, yaitu TFL yang dipilih melalui proses open recruitment dari SATKER (satuan kerja) PUPR dan perangkat Desa yang ditunjuk melalui perwakilan masyarakat dan perangkat Desa lainnya. Adapun tugas dari TFL yaitu sebagai pendamping dan membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan dari program BSPS agar dapat berswadaya secara berkelompok dalam membangun rumah yang layak huni. Sedangkan tugas dari perangkat Desa yaitu untuk memilih masyarakat yang pantas menerima bantuan tanpa berdasarkan kedekatan diri kepada calon penerima. Oleh karenanya keterlibatan para pelaksana

program BSPS diharapkan dapat membantu berjalannya implementasi dari program ini dengan efektif, transparansi dan akuntabel.

Implementasi program BSPS di Desa Jelutung II pelaksana atau implementor nya, yaitu TFL dan perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS di Desa Jelutung II tahun 2020 masih kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pasal 18 Ayat kedua yang berbunyi bahwa kesepakatan calon penerima, pembentukan KPB, dan menentukan tokoh penyediaan bahan bangunan dalam program BSPS dilakukan melalui rembuk warga. Sebab dari itu implementor dari program BSPS belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena, tidak mengikuti peraturan yang ada.

Dengan demikian, TFL dan perangkat Desa belum efektif dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga implementor dari program BSPS di Desa Jelutung II. TFL kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, apabila berada di lapangan TFL hanya mengambil foto rumah saja yang kemudian pergi tanpa adanya saran mengenai pembangunan rumah tersebut. Namun dalam peraturan disebutkan bahwa TFL seharusnya mendampingi penerima bantuan dari awal sampai akhir pembangunan termasuk memberikan arahan dalam proses pembangunan rumah.

f. Sumber daya

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya sumber daya yang baik sehingga dapat memberikan hasil yang positif serta berguna dalam mensukseskan suatu kebijakan maupun program. Sumber daya yang baik tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan dapat didukung dengan sumber daya yang berkualitas sehingga dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai di dalam bidangnya. Oleh karena itu dalam proses implementasi suatu kebijakan sangat dibutuhkan SDM agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Namun tidak hanya SDM saja yang sangat dibutuhkan dalam suatu implementasi dari sebuah program, yaitu Sumber Daya Non Manusia, seperti mesin, material dan bahan-bahan yang lainnya. Namun dalam program BSPS adapun sumber daya yang dilibatkan yaitu SDM dan non SDM.

Pada proses pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) program prakerja sudah memulai dengan baik dengan melakukan Open Recruitment dan EVKIN (Evaluasi Kinerja) terhadap TFL BSPS. Tindakan ini merupakan suatu hal yang bagus bagi implementasi program BSPS yang melibatkan SDM yang berkompeten di bidangnya. Seperti TFL yang harus orang teknik engineer yang paham masalah konstruksi bangunan dan pemberdayaan masyarakat, ini hal yang diperhatikan terlebih dahulu pada proses open recruitment dalam program BSPS. Namun apabila sudah pernah menjadi TFL BSPS di tahun-tahun sebelumnya, pihak PUPR akan melihat kinerja pada tahun sebelumnya.

Adapun sumber non SDM dalam program BSPS, yaitu seperti bahan material bangunan. Bahan material bangunan ini merupakan bahan bangunan yang berkualitas tinggi atau bagus. Sehingga rumah yang telah dibangun masyarakat memiliki kualitas bagus yang tidak membahayakan keselamatan penghuni, contohnya seperti pasir, semen atau batako harus memiliki kualitas yang bagus. Karena, apabila kualitas bahan material kurang bagus akan memberi efek buruk pada rumah itu sendiri, yaitu rumah akan menjadi mudah rusak dan hal ini sangat membahayakan penghuni rumah. Jadi dalam program BSPS sumber daya non manusia yang berkualitas juga berperan penting dalam pembangunan rumah. Namun untuk Desa Jelutung II sumber

daya non manusia yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan seperti bahan bangunan atau material sudah memiliki kualitas yang cukup bagus dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

2. Berdasarkan lingkungan kebijakan
 - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

Pada indikator ini peneliti akan fokus pada kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam proses implementasi suatu kebijakan. Menurut Marilee S. Grindle dalam Aziz Muhammad (2019) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor perlu diperhitungkan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi suatu program.

Bagian indikator ini dapat melihat dari kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS di Desa Jeutung II dan TFL BSPS di Desa Jelutung II, beserta dengan strategi yang mereka gunakan dalam implementasi dari program BSPS di Desa Jelutung II.

Implementasi program BSPS di Desa Jelutung II para implementor memanfaatkan peran mereka dalam memilih penerima bantuan dari program BSPS lebih mengutamakan orang-orang terdekat mereka sebagai penerima bantuan tersebut. Kemudian strategi dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II masih pada strategi ini diharapkan para implementor dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat tentang BSPS. Sosialisasi merupakan salah satu strategi yang harus dilaksanakan oleh para implementor dari program BSPS guna memperlancar proses dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu membangun rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu implementor dari implementasi program BSPS di Desa Jelutung II, sosialisasi diadakan hanya kepada ketua RT saja. Dari ketua RT dapat menyarankan siapa yang berhak

untuk menerima bantuan. Akan tetapi ketua RT di Desa Jelutung II sama sekali tidak terlibat dalam program BSPS baik dari pendataan maupun sosialisasi. Jadi proses implementasi dari program BSPS hanya melibatkan perangkat Desa TFL dan pihak Kabupaten dan tidak melibatkan ketua RT.

Hal ini merupakan bagian dari kendala dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai cara untuk menyampaikan informasi mengenai program BSPS di Desa Jelutung II kepada masyarakat apabila tidak boleh membuat suatu perkumpulan salah satunya yaitu mengirimkan surat perintah kepada ketua RT untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdapat program BSPS yaitu program pembangunan rumah untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat membantu perangkat Desa dan TFL dalam menjalankan tugasnya yang dapat melibatkan ketua RT dari Desa tersebut.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Pada bagian ini akan melihat serta menjelaskan bagaimana karakteristik lembaga yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan dari program BSPS di Desa Jelutung II. Karakteristik lembaga dan penguasa program BSPS dilihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi dari program BSPS itu sendiri di Desa Jelutung II.

Tugas perangkat Desa dalam program BSPS menunjukkan rumah penerima kepada pengantar bahan material sehingga tidak salah rumah dan mendata siapa yang pantas untuk menerima bantuan program BSPS. Pendataan tersebut dilakukan oleh perangkat Desa dengan mendatangi rumah-rumah orang yang dianggap pantas untuk mendapatkan bantuan yang kemudian menawarkan bantuan ini kepada calon penerima tanpa harus mengutamakan orang-orang terdekat. Tetapi berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa perangkat Desa lebih mengutamakan orang-orang terdekat

untuk menerima bantuan dari program BSPS.

Perangkat Desa dan TFL harus tegas dalam menjalankan tugas dengan tidak mengutamakan pihak manapun tetapi sesuai dengan peraturan yang ada. Karena target dari program BSPS masih kurang tetap sasaran.

Dengan demikian pada indikator ini implementasi program BSPS di Desa Jelutung II masih kurang efektif. Dikarenakan, pada proses pemilihan calon penerima bantuan memilih dengan berdasarkan kedekatan sebagai keluarga, teman, dan kerabat dekat. Dimana seharusnya program BSPS ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa berdasarkan kedekatan apapun, sehingga target utama dalam program tersebut dapat tercapai.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari para implementor merupakan salah satu faktor berhasilnya implementasi suatu program. Sejauhmana kepatuhan serta respon dari para pelaksana dalam tugas yang telah diberikan. Pada bagian ini peneliti akan melihat apakah para implementor mengetahui adanya peraturan mengenai program BSPS. peraturan yang akan menjadi patokan peneliti yaitu Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS telah mengetahui syarat-syarat penerima bantuan program BSPS dengan cukup baik. Namun dari penentuan penerima masih kurang efektif, karena dari beberapa persyaratan diatas masih ada yang belum terimplementasikan dengan baik oleh para implementor yang seharusnya mengutamakan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Maka dengan demikian pada indikator kepatuhan dan daya tanggap atau respon dari para implementor masih kurang efektif. Masih terdapat beberapa peraturan atau persyaratan yang diabaikan oleh para implementor. Implementor masih kurang

memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan adanya program BSPS ini. Dengan lebih mengutamakan mengutamakan orang terdekat merupakan salah satu ketidak patuhan implementor terhadap peraturan yang ada. Seharusnya implementor melakukan tugas dengan berpedoman dengan peraturan yang sudah ada yaitu peraturan kementerian No 07 tahun 2018 tentang program BSPS.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Jelutung II

1. Faktor pendukung

Mengenai faktor pendukung dalam program BSPS di Desa Jelutung II, yaitu jarak antara tempat toko bangunan tidak terlalu jauh dari Desa Jelutung II, sehingga hampir tidak ditemui bahan material yang cacat. Namun apabila dalam proses pengiriman bahan material terdapat yang cacat, maka pihak tokoh akan bertanggung jawab dengan menggantikan dengan bahan bangunan yang baru. Hal ini merupakan jadi faktor pendukung dari program BSPS di Desa Jelutung II, karena banyak terjadi di daerah-daerah luar terdapat bahan material atau bangunan yang rusak pada saat pengiriman barang yang dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh dan jalan yang kurang memungkinkan.

Selain itu kualitas dari bahan material juga merupakan salah satu faktor pendukung program BSPS di Desa Jelutung II. Bahan material yang diterima oleh masyarakat yang menerima bantuan memiliki kualitas yang cukup baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan suatu kelebihan dari program BSPS di Desa Jelutung II yang dimana diketahui banyak di kota-kota besar yang juga mendapatkan program BSPS salah satu kendala yang mereka hadapi yaitu mendapatkan kualitas barang yang kualitasnya kurang bagus. Kualitas suatu bahan bangunan atau barang dalam program BSPS menjadi salah persoalan yang serius. Apabila barang yang diterima memiliki kualitas yang kurang baik maka program tersebut dapat dikatakan kurang berhasil. Karena, dapat membahayakan calon penguin rumah tersebut.

2. Faktor penghambat

Dalam faktor penghambat terdapat beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor cuaca

Cuaca merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II. Apabila cuaca kurang bagus atau hujan maka pembangunan rumah tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan penguluran waktu bagi penerima bantuan. Karena, dalam proses pembuatan rumah penerima bantuan diberi waktu selama dua bulan untuk proses pembangunan rumah. Oleh karena itu cuaca yang buruk merupakan salah satu kendala dalam pembangunan rumah.

b. Ketersediaan tukang

Ketersediaan tukang juga merupakan salah satu faktor penghambat dari program BSPS. Karena, dalam proses pembangunan rumah penerima bantuan kesulitan untuk mencari tukang untuk proses pembangunan rumah tersebut. Sehingga proses pembuatan mereka menjadi terhambat.

c. Keterlambatan barang

Keterlambatan barang dalam proses pengiriman kepada masyarakat yang menerima bantuan merupakan salah satu faktor kendala dalam program BSPS di Desa Jelutung II. Terdapat beberapa penerima yang mengalami keterlambatan barang tersebut yang cukup lama sehingga proses pembuatan atau pembangunan rumah sama sekali tidak berjalan. Oleh karena itu, proses pembangunan rumah tidak berjalan dengan efektif.

d. Dana

Dana merupakan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan program BSPS di Desa Jelutung II. Banyak masyarakat yang menolak berkenaan dengan dana yang tidak mereka miliki. Keterbatasan dana dalam implementasi program BSPS dapat menghambat proses pembuatan rumah. Banyak kejadian dimana dana merupakan suatu persoalan

yang serius dalam program BSPS dimana penerima seringkali menunda pembangunan karena kurangnya bahan bangunan karena pembuatan rumah yang terlalu besar sehingga mereka menggu mendapatkan uang terlebih dahulu untuk melanjutkan pembangunan. Akan tetapi dana tersebut akan cukup apabila pembangunan rumah sudah sesuai dengan yang ada di peraturan. Apabila masyarakat membuat rumah sesuai yang telah dianjurkan maka dana tersebut dapat dikatakan cukup untuk membuat satu rumah tersebut. Walaupun ada tambahan, tambahan tersebut tidak akan terlalu besar apabila mengikuti anjuran yang tertera dalam peraturan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian peneliti dengan judul “Politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Tahun 2020” yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mendapatkan kesimpulan yang berdasarkan dari politik Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut yaitu:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup beberapa indikator sebagai berikut :

a. Kepentingan kelompok sasaran (*target group*)

Dalam indikator kepentingan kelompok sasaran sudah dicantumkan dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Pasal 1 Ayat 1 telah disebutkan bahwa target atau sasaran dari program BSPS merupakan Masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun tujuannya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki atau menempati rumah yang layak huni dengan lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada indikator ini dalam program BSPS mengenai sasaran atau *target group* sudah sangat jelas dalam peraturan tersebut.

b. Jenis dan manfaat yang diterima oleh *target group*

Adapun manfaat yang diperoleh dalam program BSPS di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba dapat dirasakan oleh penerima dari program tersebut. Dimana mereka merasakan rumah menjadi lebih nyaman, aman, dan bersih. Sebab dari itu, dalam indikator ini dalam program BSPS dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan sangat membantu.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan dalam program BSPS ialah, mengharapkan kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat menciptakan hidup sehat dan kemudian dapat memberikan semangat dalam bekerja. Karena dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan mengharapkan dapat merubah status keluarga.

d. Letak sebuah program

Letak sebuah program masih kurang tepat. Terdapat penerima yang tidak masuk kedalam kategori penerima bantuan dari program BSPS. dikarenakan, dalam pemilihan calon penerima bantuan perangkat Desa yang bertanggung jawab lebih memprioritaskan keluarga, kerabat dekat dan teman. Dalam implementasi program BSPS di Desa Jelutung II masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam penentuan calon penerima bantuan dan kurangnya transparansi dari perangkat Desa.

e. Pelaksana atau implementor

Pelaksana program BSPS di Desa Jelutung II yaitu, PUPR Kabupaten untuk mensurvei masyarakat, tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang bertugas untuk mendampingi masyarakat yang menerima bantuan dan pengarahan kepada masyarakat. Terakhir perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam program BSPS di Desa tersebut yang bertugas untuk memilih atau mendata calon penerima bantuan. namun dalam melaksanakan tugasnya masih kurang efektif.

f. Sumber daya

Dalam program BSPS adapun sumber daya yang digunakan yaitu, SDM dan Non SDM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan dalam program BSPS ialah, PUPR Kabupaten, TFL dan Perangkat Desa. sedangkan Non SDM yaitu perlengkapan atau alat untuk pembangunan rumah, seperti semen, batako, pasir, dan lain-lainnya. Non SDM yang dikerahkan dalam program BSPS di Desa Jelutung II memiliki kualitas yang bagus.

2. Berdasarkan lingkungan kebijakan (*context of implementation*)

a. Kekuasaan dan strategi aktor

Masih kurang sosialisasi yang dilakukan oleh para implementor atau pelaksana dari program BSPS di Desa Jelutung II. Dapat dilihat dari wawancara peneliti kepada masyarakat dan TFL mengenai sosialisasi dari program tersebut. Dan kurang memanfaatkan kekuasaan dengan baik.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa di Desa Jelutung II dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada proses pelaksanaan program BSPS. karakteristik lembaga dan penguasa belum begitu baik terhadap beberapa masyarakat.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana masih kurang efektif. Dikarenakan dalam peraturan kementerian PUPR No 07 Tahun 2018 tentang program BSPS masih terdapat beberapa point-point penting yang diabaikan oleh para implementor atau pelaksana dari program BSPS di Desa Jelutung II.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program BSPS di Desa Jelutung II sebagai berikut. Faktor pendukung implementasi program BSPS yaitu, kualitas bahan bangunan yang diterima oleh masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik. Sedangkan faktor penghambat dari proses implementasi program BSPS di Desa Jelutung II yaitu, cuaca, kesediaan tukang, keterlambatan barang, dan dana yang kurang cukup.

B. Saran

Dari hasil akhir dalam skripsi ini peneliti mengajukan berbagai saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak PURP Kabupaten, TFL dan Desa, dapat memaksimalkan kembali sosialisasi mengenai program BSPS. sehingga seluruh kalangan yang di masyarakat dapat mengetahui adanya program tersebut.
2. Dapat memperbaharui data kemiskinan setiap tahun, sehingga pendistribusian program BSPS dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan penerima bantuan.

Libatkan peran ketua RT dan BPD dalam pelaksanaan dari program tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifuddin. 2014. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Edisi Dua, Jakarta Erlangga
- Martono, Nanang. 2025. Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: PT RajaGravindo Persada.
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Cetakan Pertama. Jakarta: GP Press Group.
- Nurdin, Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo. Jakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. Menyusun Proposal Penelitian. Pangkalpinang: UBB Press.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono. 2021. Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administratif. Alfabeta: Bandung
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif

- Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung). Bandung: Nusa Media
- Jurnal dan Skripsi
- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Universitas Negeri Makassar
- Arwana, I Gede dan Karmini. 2018. Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentas Kemiskinan di Kecamatan Tejakula Buleleng. Universitas Udayana Bali.
- Aziz, Muhammad I A. 2019. Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Universitas Sriwijaya Indralaya. Palembang.
- Esariti Landung, Dkk. 2020. Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hunian Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hutasoit, Pryda R. 2018. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Indahyani dan badriah Sitti. 2020. Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentas Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majane) Universitas Sulawesi Barat.
- Kasmawati, dkk. 2019. Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Universitas Islam Kalimantan
- Maya, Desa Sari. 2019. Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Selatan). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Salitonga, Romaully. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang.
- Suciati, Annisa. 2017. Kebijakan Publik Dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Sumber Lainnya
- Bps.go.id: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1242/sdgs_11/1 (Diakses 12/04/2021, 01:10)
- Bisnis.com : <https://m.bisnis.com/amp/read/20201216/47/1331815/begini-peran-penting-tfl-dalam-program-bedah-rumah> (Diakses 17/06/2021, 23:15)
- Klikbabel.com : <https://klikbabel.com/2019/01/31/383-unit-rumah-bangka-selatan-terima-bantuan-program-layak-huni> (Diakses 08/03/2021, 20:37)
- TribunNews.com: https://mtribunnewscom.cd.n.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2021/11/19/ump-bangka-belitung-2022-ditetapkan-rp-32-juta-naikrp34859?amp_js_v=a6&_gsa=1&u_sqp=mq331AQKKAFAQrABIIACAw%3D%3D%#aoh=1640970829623&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.tribunnews.com%2Fregional%2F2021%2F11%2F19%2Fump-bangka-belitung-2022-ditetapkan-rp-32-juta-naik-rp-34859 (Diakses 01/01/2022, 1:45)
- UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 1 Ayat 6.
- Peraturan PUPR No 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)